

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan pihak eksternal, termasuk investor, kreditur, dan regulator. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan, akurat, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu komponen utama dalam laporan keuangan adalah laba yang mencerminkan hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laba yang dilaporkan tidak hanya menjadi ukuran profitabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan dan prospek ke depannya (Kieso et al., 2020).

Sebagai indikator utama kinerja, laba memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai keputusan ekonomi. Investor sering menggunakannya untuk mengevaluasi potensi pengembalian investasi, sedangkan kreditur mengandalkan informasi laba untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang. Selain itu, laba juga menjadi alat ukur bagi manajemen dalam mengevaluasi keberhasilan strategi bisnis yang telah diterapkan. Oleh karena itu, kualitas pelaporan laba, termasuk akurasi dan transparansinya, sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (Weygandt et al., 2019).

Namun, tantangan muncul ketika laba digunakan sebagai alat manajemen laba atau *earnings management*, di mana perusahaan mungkin

memanipulasi angka untuk menciptakan kesan kinerja yang lebih baik. Penting bagi perusahaan untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan menerapkan tata kelola yang baik guna memastikan informasi laba yang disajikan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan secara objektif dan transparan (Deegan, 2000).

Manajemen laba telah menjadi topik yang menarik perhatian akademisi, praktisi, dan regulator karena potensinya untuk memengaruhi kepercayaan terhadap laporan keuangan. Healy dan Wahlen (1999) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan manajer yang menggunakan kebijakan akuntansi tertentu atau pengaturan transaksi untuk memengaruhi hasil pelaporan keuangan sesuai dengan tujuan tertentu. Praktik ini sering kali didorong oleh keinginan untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham, menjaga stabilitas laba, atau mencapai target kinerja tertentu. Namun, meskipun mungkin memberikan manfaat jangka pendek, manajemen laba dapat mengurangi transparansi laporan keuangan, sehingga menimbulkan risiko besar terhadap kualitas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan (Dechow et al., 2010).

Salah satu alasan utama di balik praktik manajemen laba adalah tekanan eksternal yang berasal dari pasar modal. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek sering menghadapi ekspektasi kinerja yang tinggi dari investor dan analis keuangan. Ketika perusahaan tidak mampu mencapai target laba yang diharapkan, manajemen cenderung menggunakan kebijakan akuntansi tertentu, seperti perubahan estimasi akuntansi atau pengakuan pendapatan yang dipercepat, untuk menyesuaikan angka laba mereka (Roychowdhury,

2006). Walaupun tindakan ini mungkin tidak melanggar hukum secara langsung, hal ini menimbulkan kekhawatiran etis karena mengurangi keandalan laporan keuangan.

Selain itu, manajemen laba juga dapat terjadi karena adanya insentif internal, seperti kompensasi berbasis kinerja atau bonus manajemen yang terkait dengan pencapaian target laba. Dalam kondisi ini, manajer cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Praktik semacam ini tidak hanya berdampak negatif pada kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi nilai perusahaan di pasar modal. Perusahaan yang terlibat dalam manajemen laba cenderung menghadapi risiko penurunan harga saham ketika praktik tersebut terungkap (Hayati dan Husnandini, 2019).

Di Indonesia, praktik manajemen laba telah menjadi isu utama, terutama di kalangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia terlibat dalam salah satu kasus manajemen laba yang menjadi sorotan publik dan regulator di Indonesia. Kasus ini berawal dari pengakuan pendapatan sebesar USD 239 juta dari perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi dalam laporan keuangan tahun 2018. Pendapatan ini berasal dari perjanjian penyediaan layanan konektivitas dalam pesawat yang sebenarnya belum terealisasi, karena pembayaran dari pihak Mahata belum dilakukan. Praktik ini dilakukan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang seolah-olah positif, dengan tujuan meningkatkan citra perusahaan di mata investor dan publik.

Pengakuan pendapatan yang belum terealisasi ini bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku, terutama prinsip konservatisme dan akuntansi akrual, yang mengharuskan pendapatan hanya diakui ketika benar-benar dapat diukur dan direalisasikan. Temuan ini kemudian diungkap oleh auditor independen dan menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar, sehingga mengurangi kepercayaan pasar terhadap perusahaan (Kompasiana.com, 2022).

Praktik manajemen laba tidak hanya merugikan pemangku kepentingan langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasar modal dan ekonomi secara lebih luas. Informasi keuangan yang tidak akurat dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, di mana investor dan kreditor mungkin membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang menyesatkan. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia, sehingga berdampak negatif pada arus investasi asing dan pertumbuhan ekonomi.

Regulator berupaya mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan pengawasan dan memperkuat aturan pelaporan keuangan. Pendekatan seperti pengungkapan wajib dan audit independen bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja perusahaan secara objektif dan dapat diandalkan. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk peran aktif komite audit, juga dapat

membantu meminimalkan peluang terjadinya manajemen laba (Dechow et al., 1996). Dengan demikian, pencegahan praktik ini tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga komitmen etika yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu upaya dalam melakukan manajemen laba adalah dengan menggunakan Aset Pajak Tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah elemen penting dalam akuntansi pajak yang mencerminkan perbedaan temporer antara pengakuan pendapatan atau beban untuk tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan (Adam dan Faridah, 2021). Perbedaan ini timbul karena standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan memiliki aturan yang berbeda mengenai kapan pendapatan atau beban diakui. Sebagai contoh, penyusutan aset tetap mungkin diakui secara berbeda dalam laporan keuangan dibandingkan dengan perhitungan pajak. Perbedaan ini menciptakan aset pajak tangguhan ketika beban pajak yang dibayarkan untuk tujuan akuntansi lebih besar daripada beban pajak yang dilaporkan dalam suatu periode tertentu (Yahya dan Wahyuningsih, 2020).

Fleksibilitas dalam pengakuan aset pajak tangguhan sering dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengatur laba yang dilaporkan. Menurut Hanlon (2005), Perusahaan yang memiliki aset pajak tangguhan cenderung memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba agar terlihat lebih optimal. Langkah ini kerap dilakukan untuk memenuhi target laba tertentu, menjaga stabilitas kinerja, atau memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor.

Untuk memastikan penggunaan aset pajak tangguhan yang etis dan sesuai aturan, standar akuntansi seperti PSAK 212 di Indonesia mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pajak tangguhan secara transparan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan yang dapat memengaruhi nilai aset pajak tangguhan. Manajemen aset pajak tangguhan yang baik tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang menguji hubungan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba telah diuji oleh beberapa peneliti terdahulu. Hasil penelitian Husni dan Idayu (2022) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Putra (2019), dan Baraja et al. (2019). Namun hasil penelitian (Olin dan Priyadi, 2024; Midiastuty et al., 2023; Suheri et al., 2020) memberikan bukti empiris bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Selain aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan juga memiliki peran penting dalam praktik manajemen laba. Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal, sedangkan maksud dari perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Olin dan Priyadi, 2024).

Perbedaan temporer ini sering kali muncul karena perbedaan perlakuan terhadap pendapatan atau beban tertentu, seperti penyusutan aset tetap atau pengakuan pendapatan diterima di muka. Dengan memanfaatkan perbedaan ini, perusahaan dapat mengatur beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi untuk memengaruhi laba bersih yang dilaporkan.

Penggunaan beban pajak tangguhan sebagai alat manajemen laba telah menjadi strategi yang menarik bagi perusahaan yang berupaya menjaga stabilitas kinerja keuangan mereka. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan sering kali menghadapi tekanan untuk menunjukkan kinerja finansial yang baik kepada pemangku kepentingan, termasuk investor dan kreditor. Dengan menunda pengakuan beban pajak yang lebih besar ke periode mendatang, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini tidak hanya membantu dalam memenuhi ekspektasi pasar, tetapi juga dapat meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan dalam jangka pendek (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Beban pajak tangguhan sering dimanipulasi sebagai bagian dari strategi manajemen laba. Perusahaan dapat menyesuaikan ketentuan pajak tangguhan mereka untuk memperlancar keuntungan, yang dapat signifikan secara ekonomi. Manipulasi ini terkait dengan berbagai faktor, termasuk apakah perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian sebelum pajak, penyesuaian pajak tahun sebelumnya, dan keuntungan pajak perusahaan lanjutan (Holland dan Jackson, 2004).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anggraini et al., 2020; Baraja et al., 2019; Olin dan Priyadi, 2024) memberikan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara, hasil penelitian (Rahmanjani et al., 2023; Gulo dan Mappadang, 2022; Prasetyo et al., 2021) memberikan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Manipulasi beban pajak tangguhan tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuntungan atau kerugian, tetapi juga sejalan dengan praktik perencanaan pajak yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan. Perencanaan pajak adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola beban pajak dan memaksimalkan keuntungan setelah pajak (Suheri et al., 2020). Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak (*tax management*), yaitu usaha menyeluruh yang dilakukan manager pajak (*tax Manager*) dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Olin dan Priyadi, 2024; Rahmanjani et al., 2023; Suheri et al., 2020) memberikan bukti empiris bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sementara, hasil penelitian (Gulo dan Mappadang, 2022; Husni dan Idayu,

2022; Putra, 2019) memberikan bukti empiris bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Perbedaan hasil ini mencerminkan adanya celah penelitian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba”**, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap praktik manajemen laba pada Perusahaan BUMN yang sahamnya terdaftar di BEI tahun 2019 - 2023, sekaligus memperkaya literatur yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi dan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan menulis mengenai praktik manajemen laba di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Dengan menganalisis hubungan antara aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik di bidang akuntansi dan perpajakan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan dalam membuat keputusan strategis terkait perencanaan pajak dan pengelolaan laba. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aset dan beban pajak

dapat memengaruhi laporan keuangan, perusahaan dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih baik. Dengan mengetahui dampak dari perencanaan pajak terhadap manajemen laba, pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang mendorong praktik perpajakan yang adil dan transparan, serta mengurangi potensi penghindaran pajak yang merugikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis mengadopsi sistematika penulisan yang terorganisir dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan secara rinci mengenai desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik dan sumber pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini merangkum analisis terhadap hasil penelitian, menyelidiki hubungan antara konsep dan teori, serta memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat informasi mengenai kesimpulan serta batasan penelitian. Selain itu, pada bagian ini akan disampaikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya dengan tujuan mengatasi keterbatasan yang mungkin muncul dalam penelitian ini.

